

ABSTRACT

This study examines the mechanism for determining the remuneration rights of zakat administrators (amil zakat) at the Lazismu DIY Zakat Institution from the perspective of Islamic law. Amil zakat is responsible for managing zakat funds and, in Islam, they have the right to receive a portion of the collected zakat funds. However, there are differing views on the amount and mechanism for determining amil zakat wages, both in terms of state regulations and Sharia provisions. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through observations, interviews with relevant parties at Lazismu DIY, and document analysis. The findings indicate that the remuneration system for amil zakat at Lazismu DIY is based on the policies set by the Sharia Council, yet challenges remain in terms of transparency and accountability. Additionally, from the perspective of Islamic law, discrepancies exist between Sharia provisions and actual implementation, particularly in the allocation proportion of zakat funds for amil wages. Thus, this study recommends periodic evaluations of the remuneration system for amil zakat to ensure its compliance with Sharia principles and applicable regulations. Furthermore, enhancing transparency in zakat fund management is crucial to maintaining public trust in zakat institutions.

Keywords: Amil zakat, amil wages, Islamic law, Lazismu DIY, zakat transparency.

UNIDA
GONTOR
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mekanisme penentuan hak upah amil zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZISMU DIY) dari perspektif hukum Islam. Amil zakat merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, dan dalam Islam mereka memiliki hak atas sebagian dana zakat yang terkumpul. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai besaran dan mekanisme penentuan upah amil zakat, baik dari segi regulasi negara maupun ketentuan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait di Lazismu DIY, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan amil zakat di Lazismu DIY telah mengacu pada kebijakan Dewan Syariah, namun masih terdapat tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam tinjauan hukum Islam, terdapat perbedaan antara ketentuan syariah dan implementasi di lapangan, khususnya dalam proporsi alokasi dana zakat untuk upah amil. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap sistem pengupahan amil zakat guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat menjadi aspek penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Kata kunci: Amil zakat, upah amil, hukum Islam, Lazismu DIY, transparansi zakat.

UNIDA
GONTOR
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR